

Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Fatih Depok

Nurkaidah, Andriyani

STKIP Arrahmaniyah, Universitas Muhammadiyah Jakarta

nurkaidah2203@gmail.com , andriyani@umj.ac.id

ABSTRACT

The operational structure and funding of education is an important component in educational administration management which has the capacity to have a significant impact on the quality of human resources. This study intends to ensure the following: (1) Plan the budget in order to improve educational standards; (2) allocate human resources for the purposes of managing education financing; (3) implementing education financing management; and (4) supervising the education financing system in order to improve standards at SDIT AL FATIH Depok. Qualitative, analytical and descriptive methods were used in this study. Documentation, interviews and observation are the techniques used to obtain data. Data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions are the four components of Miles and Huberman's interactive analysis model used in the data analysis approach. Credibility, transferability, dependability and confirmability are used in the process of determining data validity. The findings show the following: 1) SDIT AL FATIH Depok prepares and describes education budget planning in the form of RAPBPT, which is implemented at the end of each year by identifying all appropriate programs and budgets. 1) The process of allocating funds for education starts from the source, where the head of the foundation decides on the choices that have been reached through meetings involving stakeholders from the school community and repeats the assessment. Putting human resources in charge of overseeing the money is secondary. The principal is responsible for the financial management of SDIT AL FATIH Depok, in accordance with the organizational structure; The foundation and education department oversee the management of SDIT AL FATIH Depok's education funds. 3. The budget implementation process is used to fund school programs, as well as spending on goods and services, development, and so on. 4. After that, the School Committee, the AL FATIH Depok Foundation, and the Education Office received the school's financial accountability report.

Keywords: Management, Financing, Education Quality.

ABSTRAK

Struktur operasional dan pendanaan pendidikan merupakan komponen penting dalam manajemen administrasi pendidikan yang memiliki kapasitas untuk memberikan dampak signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia. Studi ini bermaksud untuk memastikan hal-hal berikut: (1) Merencanakan anggaran dalam rangka meningkatkan standar pendidikan; (2) mengalokasikan sumber daya manusia untuk keperluan pengelolaan pembiayaan pendidikan; (3) melaksanakan pengelolaan pembiayaan pendidikan; dan (4) mengawasi sistem pembiayaan pendidikan dalam rangka meningkatkan standar di SDIT AL FATIH Depok. Metode kualitatif, analitis, dan deskriptif dipakai dalam studi ini. Dokumentasi, wawancara, dan observasi adalah teknik yang dipakai untuk memperoleh data. Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan empat komponen dari model analisis interaktif Miles dan Huberman yang digunakan dalam pendekatan analisis

data. Kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas digunakan dalam proses penentuan keabsahan data. Temuan menunjukkan hal-hal berikut: 1) SDIT AL FATIH Depok menyusun dan menjabarkan perencanaan anggaran pendidikan dalam bentuk RAPBPT, yang dilaksanakan setiap akhir tahun dengan mengidentifikasi seluruh program dan anggaran yang sesuai. 1) Proses pengalokasian dana untuk pendidikan dimulai dari sumbernya, dimana kepala yayasan memutuskan pilihan yang telah dicapai melalui rapat yang melibatkan para pemangku kepentingan dari komunitas sekolah dan mengulangi penilaian tersebut. Menempatkan sumber daya manusia untuk mengawasi uang adalah yang kedua. Kepala sekolah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan SDIT AL FATIH Depok, sesuai dengan struktur organisasi; yayasan dan dinas pendidikan mengawasi pengelolaan dana pendidikan SDIT AL FATIH Depok. 3. Proses pelaksanaan anggaran digunakan untuk mendanai program-program sekolah, serta belanja barang dan jasa, pengembangan, dan sebagainya. 4. Setelah itu, Komite Sekolah, Yayasan AL FATIH Depok, dan Dinas Pendidikan mendapatkan laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah.

Kata Kunci: Manajemen, Pembiayaan, Mutu Pendidikan.

PENDAHULUAN

Biaya Memiliki Dampak Besar Terhadap Perkembangan Pendidikan

Penentuan anggaran tahunan presiden atau pemerintah tentang pengeluaran tahunan negara untuk pengembangan pendidikan tidak menandakan pentingnya biaya pendidikan; sebaliknya, kesadaran serupa muncul ketika mempertimbangkan cara-cara untuk memajukan pendidikan, terutama di bidang kualitas, pemerataan, efisiensi, dan relevansi. Semua gagasan ini terkait erat dengan pertimbangan biaya. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa kondisi ekonomi suatu negara akan mempengaruhi hukum dan praktik-praktik yang berkaitan dengan pendidikan serta distribusi dana pendidikan. Oleh karena itu, harga pendidikan mulai memiliki peran yang signifikan dalam menentukan seberapa efektif pendidikan tersebut diberikan dan seberapa baik pendidikan tersebut dapat menghasilkan SDM yang unggul. (Kurniady, Setiawati, dan Nurlatifah, 2015: 266).

Dari tingkat makro (nasional) hingga mikro (unit sekolah), pembiayaan pendidikan merupakan bidang yang rumit dengan banyak elemen yang saling berhubungan. Elemen-elemen tersebut meliputi sumber-sumber pendanaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi penerapannya, pertanggungjawaban hasil yang diperoleh dari perubahan-perubahan yang terjadi di semua lingkungan, terutama sekolah, dan isu-isu yang belum terselesaikan yang masih perlu diteliti lebih lanjut agar lebih akurat.

Manajemen pembiayaan merupakan komponen pendidikan yang harus dilaksanakan baik di tingkat makro (nasional) maupun mikro (institusional) untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas pendidikan. Sekolah membuat laporan tahunan yang dikenal sebagai Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yang menguraikan bagaimana pengeluaran digunakan dan pendapatan direncanakan untuk kebutuhan operasional sekolah. Penyusunan dan penerapan pengeluaran ini menjadi contoh tugas-tugas yang terlibat dalam manajemen keuangan sekolah. Dengan seperti itu dalam keseluruhan jenjang penyelenggaraan

pendidikan manajemen pembiayaan ialah suatu hal utama dalam penjaminan pelaksanaan pendidikan kualitasnya baik (Fadillah, Agung, dan Yudana, 2015: 4).

Karena lembaga pendidikan menaikkan biaya pendidikan sambil memperhitungkan biaya operasional, biaya pendidikan yang tinggi telah lama menjadi perhatian. Hal ini tentu saja mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk membayar biaya bersama. Baik bagi masyarakat maupun lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan, rencana manajemen untuk mendanai pendidikan sangat diperlukan.

Kepala sekolah dituntut untuk memahami berbagai tanggung jawab dan prosedur yang terkait dengan pengelolaan dana pendidikan, yang dimulai dari penyusunan RKAS bagi sekolah yang menerima dana BOS. Memahami proses penyusunan RKAS secara menyeluruh akan berdampak positif terhadap optimalisasi alokasi dana pemerintah secara tidak langsung. Selain itu, untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas, perencanaan dan pengawasan penggunaan dana BOS harus diperkuat. Untuk mencapai tujuan pendidikan, setiap proses manajemen pembiayaan harus dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan siswa dan pendidik. Untuk meningkatkan taraf pendidikan, pada akhirnya diharapkan semua orang dapat mencapai kriteria pendidikan nasional.

Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, bertanggung jawab untuk memberikan subsidi pendidikan selain pemerintah pusat. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memiliki berbagai ketentuan yang menjelaskan hal ini. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya wajib belajar minimal bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun, sesuai dengan Pasal 11 Ayat 2. Menurut Pasal 49 Ayat 1, sektor pendidikan menerima sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan sekurang-kurangnya 20% dari APBD untuk pendanaan selain gaji guru dan belanja pendidikan kedinasan. Diharapkan dengan adanya anggaran pendidikan ini dapat meningkatkan standar pendidikan di Indonesia.

Proses pengalokasian dana untuk kegiatan pendidikan sangat rumit dan menuntut Kementerian Pendidikan untuk memberikan kriteria yang jelas untuk pengembangan APBS dan pemantauan pengeluaran sekolah yang optimal, selanjutnya untuk staf yang terampil di departemen manajemen keuangan. Penyelenggaraan pendidikan dapat memburuk jika hal ini tidak terpenuhi. Beberapa masalah dalam pembiayaan pendidikan terkait dengan kurangnya keterbukaan dalam cara sekolah mengelola uang mereka, yang mendorong perilaku yang tidak etis, selain sumber dana yang terbatas dan alokasi dana yang tidak merata. Dalam kurun waktu 10 tahun antara tahun 2007 dan 2017, telah terjadi 425 kasus korupsi dalam sistem pendidikan. Dengan total suap sebesar Rp 1,3 triliun dan Rp 55 miliar, kasus-kasus tersebut merugikan negara. Diklaim bahwa enam belas orang terkait dengan setiap kejadian ini (Puspitasari, 2017: 10).

Secara teknis, administrasi pendanaan pendidikan di sekolah swasta berbeda dengan sekolah negeri. Sekolah swasta terkadang masih memungut biaya pendidikan setiap bulannya untuk membiayai kegiatan lain, bahkan setelah menerima subsidi

BOS. Meskipun pemerintah telah memenuhi amanat konstitusi UU No. 20/2003 tentang alokasi 20% dari anggaran negara dan daerah untuk sektor pendidikan, sekolah swasta biasanya menerima porsi anggaran yang lebih kecil daripada sekolah negeri, menurut Wijaya (2009: 47) dalam studi yang judulnya "Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah terhadap Mutu Pendidikan". SDIT AL FATIH Depok juga demikian, berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan dengan kepala sekolah. Dana BOS yang diberikan oleh pemerintah biasanya dicairkan setiap tiga bulan sekali, terkadang di akhir bulan, dan sering mengalami keterlambatan. Hal ini seringkali menyulitkan sekolah untuk menutupi kekurangan dana yang dibutuhkan untuk operasional sehari-hari.

Sebuah sekolah dasar, SDIT AL FATIH Depok baru didirikan pada tanggal 04 Oktober 2008, dan mendapatkan nomor SK 1221.2 / 0774 / 2008. Sekolah ini terlihat berkembang dengan sangat cepat berdasarkan sejumlah variabel yang berhubungan baik dengan kualitas pendidikan, seperti prestasi, pendaftaran, uang, dan manajemen. Siswa di SDIT AL FATIH Depok diwajibkan membayar uang sekolah, namun dengan harga yang terjangkau.

Sangat menarik untuk melihat bagaimana SDIT AL FATIH Depok mengelola keuangan pendidikan, mengingat SDIT AL FATIH Depok merupakan sekolah dasar swasta yang baru beroperasi selama 15 tahun.

Sebanyak 76.809 siswa di 509 sekolah dasar negeri dan swasta menerima dana BOS senilai Rp 12.289.440.000 pada kuartal pertama tahun 2017, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat di Kota Depok. Di Kota Depok, Kecamatan Pancoran Mas menerima Rp 724.320.000, atau 6% dari dana BOS, untuk 4.527 siswa sekolah dasar yang terdaftar di 37 lembaga pendidikan negeri dan swasta. Sebanyak Rp 66.400.000, atau 9,17% dari dana BOS yang dialokasikan di Kota Depok, diberikan kepada SDIT AL FATIH Depok, yang memiliki jumlah siswa terbesar (415 siswa), hal ini mengacu pada data statistik.

Dana BOS Kota Depok untuk 504 unit sekolah dasar negeri dan swasta yang melayani 76.160 siswa mengalami penurunan sebesar 0,84 persen pada triwulan pertama tahun 2018 menjadi Rp. 12.185.600.000,-. Hal ini terjadi setahun kemudian. Dana BOS Depok turun 1,77 persen menjadi Rp. 711.520.000,- untuk 4.347 siswa dari 37 SD negeri dan swasta. Selain itu, untuk 470 siswa, SDIT AL FATIH Depok mendapatkan dana BOS sebesar Rp. 75.200.000, atau naik 13,25 persen. Namun, dana ini merupakan bagian terbesar dari pendapatan BOS, yaitu 10,57 persen.

Dana BOS yang diterima di tingkat kota, kecamatan, dan SDIT AL FATIH Depok mengalami pertumbuhan yang signifikan pada kuartal kedua tahun 2018. Peningkatan rata-rata sebesar 98,71 persen, atau Rp 148.480.000,- dibandingkan triwulan pertama. Hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa, selama tiga tahun terakhir, SDIT AL FATIH Depok secara konsisten memperoleh persentase terbesar dari dana BOS di Kecamatan Suruh, yaitu sebesar 10,13 persen per tahun. Semua hal di atas menunjukkan keunggulan SDIT AL FATIH Depok dalam mengelola keuangan untuk pendidikan, yang memungkinkannya untuk meningkatkan pendidikan dengan lebih cepat dan mencapai banyak tujuan pendidikan, termasuk mempersulit siswa yang

ingin masuk ke sekolah.

Dengan jumlah siswa yang terus meningkat, SDIT AL FATIH Depok telah menunjukkan kemampuannya untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada bulan Mei 2018, SDIT AL FATIH Depok memiliki jumlah murid terbanyak selama tiga tahun terakhir - lebih dari 450 anak - jauh di atas rata-rata jumlah murid di sekolah dasar lain di Kecamatan Panmas, yaitu sekitar 100 murid. Sejak berdirinya sekolah ini pada tahun 2008 hingga tahun 2010, jumlah murid yang terdaftar di SDIT AL FATIH Depok kurang dari 100 orang.

Salah satu keuntungan lain dari bersekolah di SDIT AL FATIH Depok adalah tenaga pengajarnya yang cukup berkualitas, dengan rata-rata pendidikan sarjana, dan lembaga ini memiliki ruang yang cukup untuk mengakomodasi pengajaran di kelas dan sesi belajar. Untuk memastikan bahwa siswa dapat belajar di lingkungan yang sehat, sekolah juga menyediakan konsumsi untuk mendukung kesehatan siswa di samping pemeriksaan kesehatan rutin. Sekolah juga memberikan penghargaan kepada guru, staf, dan siswa yang berhasil di bidang akademik dan ekstrakurikuler dalam berbagai kategori pada akhir tahun akademik dalam upaya untuk mendorong pembelajaran yang berkelanjutan.

TINJAUAN LITERATUR

Akdon, Dedy, dan Deni (2015: 28) menyatakan bahwasannya semua biaya yang secara langsung terkait dengan penyelenggaraan pendidikan termasuk dalam biaya pendidikan. Pemborosan mengacu pada pengeluaran yang mungkin dapat dihindari dan termasuk biaya yang tidak secara langsung terkait dengan penyelenggaraan pendidikan..

Terdapat adanya perbedaan oleh Matin (2014: 8) bahwasannya biaya pendidikan, baik yang bersifat finansial maupun tidak, merupakan perwujudan kewajiban setiap orang (pemerintah, orang tua, dan masyarakat) untuk memajukan pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan secara berhasil dan efisien. Uang harus dikumpulkan secara teratur dari berbagai sumber, disimpan, digabungkan, dan diatur secara administratif agar dapat digunakan dengan sukses dan efisien.

Dengan mempertimbangkan semua yang disediakan untuk setiap aktivitas dalam menggapai cita-cita pendidikan yang terorganisir, biaya pendidikan yang sebenarnya dapat dilihat sebagai lebih dari sekadar uang.

Suharsaputra (2013: 289) berpendapat bahwa mempelajari bagaimana membiayai pendidikan dapat dilihat sebagai mempelajari bagaimana mendanai pendidikan, siapa yang mendapatkan uang, dan bagaimana cara mendanainya. Definisi ini terdiri dari dua bagian: sumber-sumber pembiayaan dan alokasi uang untuk pendidikan. Lalu pendapat Zymelman dalam Anwar (2003: 109) menunjukkan bahwa pendanaan untuk pendidikan melibatkan manajemen keuangan yang efektif dan analisis sumber dana. Lebih sedikit uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan sistem pendidikan yang efisien, yang berarti bisa lebih hal yang bisa dilaksanakan dengan dana yang diberikan.

Fattah (2017: 62) bahwasannya mengumpulkan biaya dan mengawasi anggaran untuk pendapatan dan pengeluaran sekunder merupakan proses pendanaan pendidikan. Perencanaan biaya, mendapatkan dana untuk membantu perencanaan, dan pengawasan anggaran adalah langkah pertama dalam proses ini.

Pendapat Minarti (2011: 238), terdapat dua tindakan yang bisa dipakai untuk mengklasifikasikan proses implementasi pendanaan secara umum.

- a. Penerimaan dari sumber-sumber pendanaan untuk pendidikan sekolah harus didokumentasikan sesuai dengan praktik manajemen yang mengikuti pedoman yang telah ditetapkan. Anggaran rutin, uang masyarakat, donor, anggaran pengembangan, anggaran untuk dukungan pendidikan, dan sumber-sumber lain adalah beberapa sumber pendanaan.
- b. Pengeluaran: Penggunaan uang yang bijaksana dan ekonomis yang diperoleh dari berbagai sumber diperlukan. Hal ini menyiratkan bahwa ketika memutuskan bagaimana membiayai pendidikan di sekolah, persyaratan yang telah dimodifikasi harus menjadi dasar untuk memperoleh uang untuk pembelanjaan.

Setelah mempertimbangkan beberapa perspektif tentang masalah ini, dapat dikatakan bahwa keuangan pendidikan adalah sebuah investigasi terhadap sumber-sumber pendanaan dan distribusi uang yang dibutuhkan untuk berbagai aspek organisasi sekolah. Tujuan-tujuan yang harus dicapai harus dipertimbangkan ketika mengalokasikan keuangan untuk pendidikan.

Penjelasan ini memperjelas bahwa pendanaan pendidikan berbeda dengan biaya pendidikan. Jumlah total uang yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan dikenal sebagai biaya pendidikan. Di sisi lain, pembiayaan pendidikan mengacu pada keseluruhan pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, termasuk sumber dan tujuan pendanaan tersebut. Pembiayaan pendidikan mengacu pada tindakan yang dilakukan untuk mencari sumber daya keuangan dan mengalokasikannya untuk memenuhi tuntutan pengaturan lingkungan belajar. Kegiatan penerimaan dan pengeluaran juga merupakan bagian dari proses pelaksanaan pembiayaan. Pembiayaan pendidikan diperoleh melalui penerimaan pembiayaan pendidikan, dimana tindakan ini dilakukan seefektif dan seefisien mungkin untuk membiayai pelaksanaan pendidikan di sekolah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipakai oleh peneliti untuk melaksanakan studi lapangan tentang pengelolaan dana pendidikan di SDIT AL FATIH Depok dijelaskan di bawah ini. Karena studi ini bermaksud untuk mengkarakterisasi administrasi pendidikan di tingkat mikro di sebuah sekolah dasar, maka strategi penelitian kualitatif dengan memakai metodologi studi kasus. Penggunaan studi kasus dalam riset ini sangat relevan karena peneliti bermaksud untuk menarik hubungan antara kebijakan di tingkat makro dan praktik di tingkat mikro dengan meneliti kasus-kasus di dalam lembaga pendidikan. Riset kualitatif pendapat Sukmadinata (2009: 60) bahwasannya

teknik studi yang dirancang untuk mengkarakterisasi dan meneliti perilaku sosial, peristiwa, sikap, kepercayaan, persepsi, dan ide individu baik secara individual maupun kelompok.

Metode yang dipakai dalam studi ini untuk mengumpulkan data mengenai administrasi pendanaan pendidikan SDIT AL FATIH Depok ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari bulan Mei 2022 hingga Januari 2023, metode studi berbasis observasi awal dilakukan untuk mempersiapkan temuan studi. Dalam studi ini, wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah metode yang dipakai untuk mengumpulkan data

a. Wawancara.

Untuk memperoleh data dan informasi yang tepat dan bisa dipercaya, peneliti mewawancarai narasumber yang telah dipilih sebelumnya. Pendapat Mulyana (2013: 180) Percakapan antara dua orang terjadi selama wawancara ketika salah satu dari mereka mengajukan pertanyaan kepada yang lain dengan tujuan untuk mengetahui lebih banyak tentang mereka. Peneliti melaksanakan wawancara dengan kepala sekolah, komite sekolah, dan wali murid guna mendapatkan data pembiayaan pendidikan yang ada di SDIT AL FATIH Depok.

b. Observasi

Dalam studi ini, para peneliti menggunakan metode observasi sebagai tambahan dari pengumpulan data berbasis wawancara. Herdiansyah (2010: 110) menyatakan bahwa observasi adalah metode atau pendekatan untuk mengumpulkan informasi dengan cara melihat orang bekerja. Untuk mengumpulkan data mengenai keadaan dan suasana sekolah, prosedur KBM, rapat, realisasi anggaran, dan sebagainya, peneliti melakukan observasi langsung di SDIT AL FATIH Depok.

c. Dokumentasi

Dalam studi ini, data-data atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pendanaan pendidikan SDIT AL FATIH Depok dikumpulkan melalui pendekatan dokumentasi. Metode dokumentasi ini dipakai untuk memberikan bukti pendukung atas informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara mengenai pembiayaan pendidikan di sekolah. Data jumlah siswa, guru, dan tenaga kependidikan lainnya di SDIT AL FATIH Depok, serta informasi mengenai fasilitas sekolah dan RKAS, merupakan beberapa dokumen yang dipakai sebagai sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Sekolah, yakni tempat untuk menimba ilmu yang resmi, memiliki keinginan yang melekat untuk menyediakan pendidikan berkualitas tinggi, yang juga berlaku untuk SDIT AL FATIH Depok. Oleh karena itu, sekolah membuat progamnya yang akan dimasukkan ke dalam RKAS. RKAS berisi informasi tentang program kegiatan sekolah serta sumber dana dan jumlah yang dibutuhkan untuk melaksanakannya.

Sistem penganggaran SDIT AL FATIH Depok adalah yang paling mirip dengan Sistem Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran (PPBS) di antara keenam sistem penganggaran yang digunakan saat ini. Seperti yang dikemukakan oleh Anwar (2003:90), PPBS ialah suatu strategi yang sistematis yang mencoba menetapkan tujuan, merancang program-program yang akan direalisasikan, memastikan biaya dan alternatif-alternatifnya, serta menerapkan teknik-teknik penganggaran yang memperhitungkan aktivitas-aktivitas program dalam jangka panjang. Berikut ini manfaat dari strategi anggaran ini; (i) bisa mengurangi beban (ii) memudahkan manajemen tingkat menengah dalam melaksanakan tugas-tugas dari manajemen tingkat atas; (iii) membantu mengeliminasi program-program yang mengganggu atau tumpang tindih dengan pencapaian tujuan organisasi.

Menurut penjelasan Anwar, metode penganggaran yang dipakai oleh SDIT AL FATIH Depok ialah PPBS, lembaga pendidikan berfokus pada tujuan dan kegiatan (program) yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini didasarkan pada pengamatan, wawancara, dan dokumen yang berkaitan dengan komponen perencanaan keuangan sekolah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rapat kerja tahunan sekolah di awal tahun untuk menentukan dana yang akan dialokasikan untuk satu tahun ke depan. Selain itu, fitur PPBS yang memperhitungkan semua pengeluaran diharapkan dapat terwakili dalam rencana kebutuhan anggaran yang berasal dari semua pihak yang terlibat, tidak hanya kepala sekolah atau kepala yayasan. Dengan demikian, sistem PPBS yang diterapkan di SDIT AL FATIH Depok diharapkan dapat mempermudah perencanaan anggaran tahun berikutnya serta penilaian terhadap pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya. Artinya, dengan menghitung manfaat dari setiap program, PPBS dapat menilai beberapa alternatif.

b. Pengorganisasian Pembiayaan Pendidikan

Administrasi atau pencatatan transaksi masuk dan keluarnya dana yang digunakan untuk mendukung program pendidikan dikenal dengan istilah "organisasi keuangan pendidikan", dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan informasi yang valid tentang pengelolaan anggaran sekolah. Kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan karena sangat bermanfaat dalam menentukan pilihan dan kebijakan yang berkaitan dengan pihak-pihak yang menggunakan anggaran pendidikan.

Pendapat Matin (2014: 92) Agar dapat mengatur dan mengawasi anggaran pendidikan secara efektif, ada tiga tugas penting yang harus diselesaikan diantaranya, mengumpulkan dan melaporkan informasi mengenai keuangan pendidikan, menyimpan catatan yang akurat mengenai pelaksanaan anggaran, dan dengan jelas mendefinisikan wewenang atas tugas dan dana.

Selain itu, anggaran untuk biaya rutin dan tidak rutin, serta biaya pertumbuhan, telah diidentifikasi oleh SDIT AL FATIH Depok. Pengukuran, pencatatan, dan klasifikasi data keuangan, serta pelaporan keuangan kepada para pemangku kepentingan, semuanya termasuk dalam kegiatan pengumpulan data ini. Data keuangan yang terkait dengan sekolah diidentifikasi secara rinci, dicatat dalam buku atau catatan harian untuk jangka waktu tertentu, dan disusun secara kronologis

dan metodis. Sejumlah tanda terima, nota, dan faktur yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang harus menyertai setiap pencatatan.

Tugas-tugas dalam pengorganisasian pembiayaan pendidikan di SDIT AL FATIH Depok, meliputi inventarisasi sumber-sumber pembiayaan, penghitungan jumlah anggaran, analisis, dan pengalokasian anggaran, telah dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam inventarisasi sumber daya keuangan untuk pendidikan meliputi pencatatan, pengelompokan, dan pengklasifikasian. Data dikumpulkan secara kronologis dan dikategorikan ke dalam kelompok tertentu ketika transaksi yang bersangkutan dicatat, sehingga memungkinkan untuk membuat ringkasan presentasi. Contoh sumber pendanaan adalah hibah yayasan, BOS, SPP, dan sebagainya. Sebagai bagian dari proses perencanaan anggaran, SDIT AL FATIH Depok juga menggunakan konsep PROB untuk menentukan jumlah anggaran awal. Kecukupan anggaran dan skala prioritas kemudian menjadi bahan pertimbangan.

Terakhir, SDIT AL FATIH Depok juga telah memeriksa alokasi anggaran dengan menggunakan enam dari enam faktor fundamental menurut Martin (2014: 122-125), terutama berdasarkan tujuan penimbangan untuk pendidikan, lingkungan belajar, instruktur, dan siswa..

Data keuangan pendidikan di SDIT AL FATIH Depok telah didokumentasikan, disortir, dan diringkaskan sesuai dengan prosedur akuntansi, dan telah ditransmisikan ke pihak-pihak yang relevan. Semua peraturan dan ketentuan yang berlaku telah diikuti dalam pembuatan laporan. Secara umum, laporan keuangan perlu dievaluasi dan dipahami agar dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Menetapkan hubungan antara angka-angka dalam laporan keuangan dan angka-angka lain dikenal sebagai analisis laporan keuangan. Hal ini lebih mudah dilakukan karena bendahara sekolah dan yayasan telah memiliki keterampilan yang diperlukan, berdasarkan hasil observasi dan wawancara.

Setelah pengumpulan data dan pelaporan keuangan, tugas kedua yang berhubungan dengan pengorganisasian yang terkait dengan administrasi atau akuntansi pelaksanaan pendidikan harus diselesaikan dengan benar. Penerapan teknis akuntansi, yang meliputi pencatatan, penyortiran, dan klasifikasi berbagai jenis transaksi keuangan yang ada, merupakan tugas pembukuan. Tugas ini tidak hanya berkaitan dengan pencatatan akuntansi, tetapi juga dengan memverifikasi, membuat laporan, menganalisis laporan, dan prosedur lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fungsi manajemen keuangan organisasi diwakili oleh akuntansi.

Simbol Kas Umum Terbuka dan Tabel Buku Kas Umum adalah dua buku yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan akuntansi ini. Informasi yang mudah dibaca yang berasal dari operasi manajemen keuangan pendidikan adalah tujuan dari semua format pembukuan yang digunakan dalam akuntansi. Dengan seperti itu, sudah sepantasnya jika seseorang yang memiliki pengalaman akuntansi menangani catatan keuangan pendidikan.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi SDIT AL FATIH Depok

telah mengimplementasikan standar pelaporan seperti itu hingga mempermudah *stake holder* dalam menganalisa hasil pembukuan tersebut.

c. Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan

Kriteria yang telah ditetapkan dan pelaksanaan aktual dapat dibandingkan untuk menilai manajemen pembiayaan pendidikan di SDIT AL FATIH Depok. Dengan demikian, jelaslah bahwa ada perbedaan - jika ada - antara standar biaya minimal yang berlaku saat ini dengan pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di SDIT AL FATIH Depok.

Studi ini memakai standar pengelolaan dana pendidikan yang didasarkan pada Permen No. 69/2009 sebagai acuan standar. Untuk menghitung biaya operasional non-personalia, peraturan tersebut menetapkan berapa banyak rombongan belajar yang diperbolehkan per sekolah atau program peminatan serta berapa banyak siswa yang diperbolehkan untuk setiap rombongan belajar. Terdapat kriteria biaya operasi non-personalia untuk SD/MI.

Biaya yang terkait dengan operasi non-personalia meliputi perlengkapan sekolah (ATS), peralatan dan bahan habis pakai (BAHP), perbaikan kecil dan pemeliharaan (MMR), listrik dan servis (PS), biaya perjalanan dan transportasi, premi asuransi, pembinaan siswa dan biaya ekstrakurikuler, biaya yang terkait dengan ujian kompetensi, praktik kerja manufaktur, dan pelaporan.

Permen No. 69/2009 menyatakan bahwa SD/MI memiliki enam rombongan belajar, dengan dua puluh delapan murid di setiap rombongan belajar. Oleh karena itu, biaya operasional non-personalia yang umum untuk SD/MI adalah Rp 97.440 untuk sekolah, Rp 16.240 untuk rombongan belajar, dan Rp 580 per anak. Untuk ATS dan BAHP, biaya minimumnya masing-masing adalah 10%.

Setiap tingkat kelas di SDIT AL FATIH Depok memiliki dua atau tiga ruang kelas, dan total ada enam rombongan belajar (kelas 1 sampai 6). Informasi ini berdasarkan hasil observasi. Dengan total 20 rombongan belajar, SDIT AL FATIH Depok menjadi rumah bagi banyak rombongan belajar. Sekitar 26 orang siswa yang tergabung dalam setiap rombongan belajar atau kelas.

Jumlah total biaya operasional non-personalia di SDIT AL FATIH Depok adalah Rp. 187,114,110. Dengan demikian, SDIT AL FATIH Depok memiliki 20 rombongan belajar, 20 program studi, dan Rp 9.355.705,- / rombongan belajar untuk biaya operasional non-personalia. Selain itu, SDIT AL FATIH Depok memiliki 465 siswa dan Rp 22.355,- per anak untuk biaya operasional non-personalia.

Dengan mengacu pada data di atas, SDIT AL FATIH Depok telah melebihi dan memenuhi ambang batas yang disyaratkan untuk pengeluaran operasional non-personalia. Meskipun memiliki anggaran biaya operasional non-personalia yang cukup besar, SDIT AL FATIH Depok telah menunjukkan kemampuan untuk mengelola sumber daya dengan baik. Fakta bahwa infrastruktur, fasilitas, dan lingkungan sekitar sekolah sudah lebih dari cukup untuk memfasilitasi proses pembelajaran siswa SDIT AL FATIH Depok membuktikan hal ini.

d. Pengawasan Pembiayaan Pendidikan

Membahas manajemen, khususnya manajemen keuangan, secara langsung terkait dengan pengalokasian uang tunai untuk tujuan tertentu. Semua jenis lembaga akan mengalami kesulitan keuangan karena masalah ini mencegah entitas mana pun beroperasi dengan baik tanpa uang. Sebuah organisasi harus menganggarkan sejumlah uang untuk sejumlah permintaan tertentu.

Dikelola oleh Yayasan Al Fatih, SDIT AL FATIH Depok adalah sekolah dasar swasta. Sebuah institusi seperti SDIT AL FATIH Depok membutuhkan uang untuk beroperasi, seperti yang telah dikatakan sebelumnya. Selain itu, Yayasan Al Fatih membutuhkan sistem manajemen keuangan yang dapat dikontrol dan, tentu saja, jauh dari definisi korupsi, mengingat SDIT AL FATIH Depok adalah perusahaan rintisan yang dikelola oleh keluarga.

Di dalam SDIT Al Fatih Depok, ada langkah-langkah yang diterapkan untuk mencegah penyelewengan uang publik dan pribadi. Dalam hal pengelolaan keuangan, SDIT AL FATIH Depok dapat dikatakan cukup transparan.

Kegiatan seperti rapat terbuka, yang dihadiri oleh semua personil sekolah yang terlibat dalam proses penganggaran pendidikan, termasuk anggota komite sekolah, merupakan contoh keterbukaan dalam tindakan.

Orang tua juga diundang untuk memberikan komentar kepada kepala sekolah SDIT AL FATIH Depok atau komite sekolah. Orang tua dapat bertanya kepada SDIT AL FATIH Depok bagaimana dana tersebut digunakan atau berapa banyak dari uang mereka yang digunakan untuk tujuan ini. SDIT AL FATIH Depok melakukan hal ini sebagai bentuk transparansi keuangan.

Selain itu, untuk memberikan informasi kepada orang tua murid mengenai keuangan di SDIT AL FATIH Depok, sekolah juga menempelkan materi di Mading mengenai strategi penggunaan dana selama satu tahun. Setelah itu, hasil dari konferensi tersebut diberikan kepada anggota sekolah pada saat rapat RKAS sehingga semua orang yang hadir mengetahui strategi pengalokasian dana untuk tahun tersebut. Bagi orang tua murid dan pengajar yang menginginkan informasi tentang apa pun, termasuk bagaimana keuangan dikelola di SDIT AL FATIH Depok, sekolah juga menyediakan kotak saran.

Personil sekolah dapat terlindung dari korupsi dengan keterbukaan SDIT AL FATIH Depok. Untuk memungkinkan Yayasan Al Faith mengawasi bagaimana uang digunakan oleh SDIT AL FATIH Depok, semua uang yang masuk ke dalam organisasi akan diawasi oleh Yayasan. Hal ini sangat membantu SDIT AL FATIH Depok dalam mengelola uangnya, sehingga memungkinkan kelancaran dan keberhasilan sistem pendanaan sekolah.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penanganan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh SDIT AL FATIH Depok merupakan salah satu contoh transparansi atau keterbukaan pengelolaan keuangan organisasi. Untuk menunjukkan hal ini, SDIT AL FATIH Depok memberi tahu orang tua murid dari mana uang tersebut berasal dan untuk apa uang tersebut digunakan.

Setelah itu, semua peserta mempresentasikan hasil rapat RKAS, informasi

diposting di situs web sekolah, khususnya mengenai pengelolaan dana di SDIT AL FATIH Depok, dan kotak saran disediakan untuk orang tua siswa dan guru yang ingin memberikan umpan balik tentang masalah apa pun, termasuk masalah dana atau pengeluaran di SDIT AL FATIH Depok.

Menurut informasi dari kepala sekolah, tidak pernah terjadi pelanggaran dalam sejarah SDIT AL FATIH Depok dalam mengimplementasikan pembiayaan pendidikan, sehingga semua berjalan sesuai rencana..

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan studi dan pembahasan bisa ditarik beberapa kesimpulan tentang manajemen pendanaan sekolah yakni:

1. Meskipun SDIT AL FATIH Depok baru didirikan pada tahun 2008, atau sekitar 15 tahun yang lalu, SDIT AL FATIH Depok merupakan sekolah swasta yang memiliki reputasi baik dan didukung oleh para pengelola yang berpengetahuan luas, terutama dalam hal pembiayaan pendidikan. SDIT AL FATIH Depok kini memiliki 450 siswa yang terdaftar, meningkat dari hanya 93 siswa pada awal berdirinya.
2. Proses perencanaan dan penganggaran untuk pembiayaan pendidikan SDIT AL FATIH Depok dilakukan melalui Rapat Kerja Tahunan. Hal ini mencakup penyusunan anggaran berdasarkan peran dan fungsi, mengajukannya ke Yayasan untuk disetujui, dan kemudian membuat proposal yang dipresentasikan kembali ke Yayasan.
3. Anggaran dari tahun sebelumnya pada dasarnya adalah apa yang masih dihasilkan oleh beberapa guru tergantung pada pekerjaan dan tugas mereka. Hal ini sebagian disebabkan oleh penerimaan yayasan dan kepala sekolah yang sangat selektif dalam menerima proposal untuk inisiatif baru atau proyek-proyek modal dengan nilai investasi yang tinggi.
4. Sumber pendanaan itu sendiri adalah langkah pertama dalam proses yang mengatur uang untuk pendidikan. Sejumlah sumber berkontribusi pada pendanaan pendidikan SDIT AL FATIH Depok. Sumber-sumber tersebut antara lain: (1) sumber pendanaan berbasis masyarakat, seperti uang sekolah dan hibah atau bantuan keuangan lainnya; dan (2) Sumber pembiayaan dari pemerintah, seperti dana BOS. Uang yang terkumpul digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pembelian produk dan jasa, kegiatan pengembangan sekolah, dan lain-lain. Yang kedua adalah susunan kepegawaian yang mengawasi pengelolaan uang tersebut. Berdasarkan struktur organisasi SDIT AL FATIH Depok, kepala sekolah bertanggung jawab untuk mengawasi dana, dengan dibantu oleh seorang guru yang bertugas sebagai bendahara. Sementara itu, setiap wali kelas atau guru kelas menerima pengelolaan kebutuhan dana untuk dilaporkan kepada sekolah. Komite dan yayasan menilai persyaratan yang diajukan setelah menerima izin dari kepala sekolah. Selain itu, bendahara yayasan memiliki wewenang untuk menyetujui proposal tersebut baik secara langsung maupun setelah diedit. Bendahara

yayasan, yang memberikan uang kepada bendahara sekolah yang merupakan kesepakatan untuk mendanai pendidikan selama satu tahun ajaran, pada akhirnya bertanggung jawab untuk melaksanakan eksekusi akhir.

5. Program-program inisiasi, perlengkapan, dan layanan sekolah didanai oleh anggaran SDIT AL FATIH Depok. Dana dibutuhkan untuk berbagai program sekolah, termasuk program pengembangan kompetensi lulusan, K-13, proses pembelajaran, guru dan tenaga kependidikan lainnya, sarana dan prasarana, manajemen sekolah, dan penggalan sumber daya manusia, yang meliputi penugasan guru dalam pelatihan, seminar, dan kegiatan lain yang mendukung sumber daya manusia. Sementara itu, belanja barang dan jasa untuk kebutuhan dana seperti kegiatan ekstrakurikuler, kesiswaan, kepramukaan, kerumahtanggaan, dan penunjang akademik.
6. APBN II menyediakan dana sebesar Rp. 575.180.000,-. Jumlah total dana pendidikan yang diterima SDIT AL FATIH Depok untuk tahun ajaran 2017-2018 adalah Rp. 973,639,467. Pada tahun 2017, saldo BOS sebesar Rp. 9.659.467,-, dengan BOS pusat sebesar Rp. 352.800.000,-.
7. Yayasan Al Fatih dan Dinas Pendidikan mengawasi pendanaan pendidikan di SDIT AL FATIH Depok. Selanjutnya, Komite Sekolah, Yayasan, dan Dinas Pendidikan mendapatkan laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Sebuah tim yang dibentuk khusus untuk mengawasi penggunaan dana yang telah dialokasikan sebelumnya mengawasi pengawasan untuk Yayasan Al Fatih. Yayasan Al Fatih, Komite Sekolah, dan Dinas Pendidikan menerima laporan anggaran bulanan yang disusun dan diserahkan oleh sekolah sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah atas penggunaan dana sekolah.
8. Manajemen keuangan di SDIT AL FATIH Depok disusun secara metodis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dimulai dengan pengajuan anggaran ke Yayasan, yang mencatat penerimaan dan pengeluaran dana sesuai dengan RKAS. Selanjutnya, ada laporan kontrol yang diawasi oleh kepala sekolah secara langsung, namun bendahara yang menangani kegiatannya. Selanjutnya, terbukti bahwa 40,72% dana dialokasikan untuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas selama semester kedua 2018. Berbagai prestasi yang diraih oleh siswa SDIT AL FATIH Depok baik di bidang akademik maupun ekstrakurikuler, kemampuan tenaga pengajar yang mumpuni, serta kondisi sarana dan prasarana yang mendukung operasional sekolah, menunjukkan adanya korelasi positif antara standar peningkatan mutu sekolah dengan kualitas pendidikan dalam hal pelaksanaan kegiatan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akdon, Kurniady, Dedy, & Darmawan, Deni. (2015). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Anis, Muhammad. (2013). *Manajemen Pembiayaan di SD Islam Assalamah Ungaran*. Jurnal Pendidikan Unnes.

- Anwar, Idochi. (2003). *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Arianti, Dewi. (2014). *Penerapan Manajemen Keuangan Pendidikan di MAN Insan Cendekia Serpong*. Tesis. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. (2016). *Akuntansi Pendidikan*. Jakarta: Erlangga.
- Cunningham, W., & Cordeiro, P. (2009). *Educational Leadership: A Bridge to Improved Practice*. New York: Pearson.
- Diamond, Jack. (2003). *From Program to Performance Budgeting: The Challenge for Emerging Market Economies*. IMF Working Paper 03/69. International Monetary Fund. Washington.
- Fadillah, Nur, Agung, Gede, & Yudana, Made. (2015). *Analisis Biaya Pendidikan Dan Hubungannya Dengan Mutu Pendidikan Pada Smp Negeri 2 Sukasada Tahun Pelajaran 2013/2014*. e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Administrasi Pendidikan, 6(1).
- Fattah, Nanang. (2009). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Fattah, Nanang. (2017). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Berbasis Aktivitas Pembelajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Fitriana, Ana. (2012). *Pembiayaan Pendidikan di MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta*. *Jurnal Manajemen Pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Gaffar, Mohammad Fakry. (2000). *Pembiayaan Pendidikan: Permasalahan dan Kebijakan dalam Perspektif Reformasi Pendidikan Nasional*. *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia IV*. Jakarta.
- Harsono. (2007). *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Haryati, Sri. (2012). *Pengembangan Model Manajemen Pembiayaan Sekolah Menengah Pertama Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional*. *Journal of Economic Education*, 1(1).
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jalal, Fasli, & Supriadi, Dedi. (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Jones, Thomas. (2005). *Introduction to School Finance: Technique and Social Policy*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Koswara, Deni, & Triatna, Cepi. (2010). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Kurniady, D., Setiawati, L., & Nurlatifah, S. (2015). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan terhadap Mutu Sekolah Menengah Kejuruan*. *Jurnal Penelitian Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Matin. (2014). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Minarti, S. (2011). *Manajemen Sekolah*. Jakarta: Ar Ruzz Media.
- Morphet, E. (2003). *The Economic and Financing of Education, Fourth Edition*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Mulyana, D. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mulyono. (2010). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nitiswari, A. (2015). Analisis Pembiayaan Pendidikan di SMP Laboratorium Undiskha Singaraja Tahun 2015. *Jurnal Manajemen Pendidikan Unand*.
- Nurhadi, M. A. (2011). *Dilema Kebijakan Pendanaan Pendidikan*. Yogyakarta: Nurhadi Center.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab IX tentang Standar Pembiayaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Prastowo, A. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Puspitasari, S. N. (2017). Lima Sektor Dana Pendidikan yang Paling Banyak di Korupsi. Diakses dari <http://www.pikiranrakyat.com/pendidikan/2017/05/17/lima-dana-di-sektor-pendidikan-yang-paling-banyak-dikorupsi-369335>
- Putera, N. (2012). *Penelitian Kualitatif Proses & Aplikasi*. Jakarta: PT Indeks.
- Riyanto, B. (2001). *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Sadiarti. (2012). Pengaruh Manajemen Pembiayaan Sekolah dan Kinerja Kepala Sekolah terhadap Produktivitas Sekolah Menengah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat. Tesis. Universitas Syah Kuala.
- Schick, A. (2008). Getting Performance Budgeting to Perform. MPRA Paper No. 9415. May 2008.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 19. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-19. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, U. (2013). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suharsaputra, U. (2013). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Supriadi, D. (2004). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Toyaman, N., & Usman, S. (2004). Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya Terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar. SMERU, Juni.
- Umar, H. (2005). *Strategic Management in Action: Konsep, Teori, dan Teknik Menganalisis Manajemen Strategis (Strategic Business Unit berdasarkan Konsep Michael R. Porter, Fred R. Davis dan Wheelen-Hunger)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Usman, H. (2009). *Manajemen: Teori Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, H. (2015). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Press.
- Wijaya, D. (2009). Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah terhadap Kualitas Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Universitas Kristen Krida Wacana Jakarta*.
- Yuliani, H. (2016). Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Ngrojo Nanggulan. *Jurnal Manajemen Pendidikan UNY*.